



Semanggi

Kabar **FRAKSI PKS** DPRD KOTA SURABAYA



Cahyo:

Kader Surabaya Hebat Butuh Peran Teknis yang Jelas

[CLICK HERE ✨](#)



Komisi C Dukung Penundaan Pembangunan RS Surabaya Selatan,

Nilai Langkah Pemkot Realistis dan Tepat

[CLICK HERE ✨](#)



ABPD 2026,

Komisi C Dorong Pencapaian Serapan Anggaran OPD-OPD

[CLICK HERE ✨](#)



Komisi B DPRD Surabaya Apresiasi

Tambahan Modal Rp 10 Miliar untuk Dukung Pelaku UMKM

[CLICK HERE ✨](#)



Penyusunan APBD Kota Surabaya Tahun 2026,

Johari Mustawan Sarankan Disbudporapar Hitung Ulang Jumlah Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh

[CLICK HERE ✨](#)



[pkspdprdsurabaya](#)



[pkstvdprdsurabaya](#)



[fraksi.pks-surabaya.or.id](#)



Cahyo:

Kader Surabaya Hebat Butuh Peran Teknis yang Jelas



Cahyo Siswo Utomo, ST., MH.
Ketua Fraksi PKS & Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya

Surabaya, JatimUPdate.id - Anggota Komisi A DPRD Surabaya, Cahyo Siswo Utomo meminta Bapemkesra evaluasi performa Kader Surabaya Hebat (KSH).

Cahyo juga menekankan KSH bekerja semaksimal mungkin di lapangan serta mengisi aplikasi.

"KSH sering mengalami perubahan, Bapemkesra harus evaluasi performa mereka. Apakah betul-betul turun ke lapangan, dan mengisi aplikasinya. Dua itu saja sebenarnya bagaimana KSH bisa berperan secara teknis untuk kontribusinya dalam memajukan Surabaya." tegas Cahyo, Senin (29/9).

Cahyo memaparkan, akan mendalami lagi terkait peran KSH dalam APBD 2026 yang tiap bulannya kerap mengalami perubahan.

"Dii APBD 2026 nanti kita coba dalami lagi terkait dengan optimisasi peran KSH di Surabaya. Jadi tiap bulan itu KSH berubah itu selalu diupdate jumlah datanya." kata Cahyo

Disingung terkait honor, Cahyo menyebut tidak pernah menerima keluhan terkait hal itu.

Meskipun tambah Cahyo honor dari KSH cuma sebesar Rp600 usai dipotong pajak.

“

Saat reses kami tidak menerima keluhan soal honor. Sebenarnya cukup signifikan, tinggal kemudian secara pengelolaan lebih dioptimalkan peran-perannya dari KSH, dioptimalkan jadi kita mengevaluasi itu," demikian Cahyo Siswo Utomo. (Roy)





**Komisi C Dukung
Penundaan
Pembangunan
RS Surabaya
Selatan,**

**Nilai
Langkah
Pemkot
Realistis
dan Tepat**

Hj. Aning Rahmawati, S.T.

Wakil Ketua Komisi C - DPRD Kota Surabaya
Sekretaris Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA, Bacasaja.id - Rencana pembangunan Rumah Sakit (RS) Surabaya Selatan resmi ditunda. Komisi C DPRD Kota Surabaya menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya tersebut sudah tepat dan realistis, mengingat kinerja RSUD Surabaya Timur atau Eka Candrarini hingga kini belum berjalan optimal.

Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menjelaskan bahwa penundaan ini bukan berarti pembatalan proyek, melainkan bentuk penyesuaian agar fasilitas kesehatan yang sudah ada bisa berfungsi lebih maksimal.

“Rumah Sakit Surabaya Timur yang tadinya ditargetkan pendapatannya mencapai seratus sekian miliar, ternyata hanya tercapai sekitar dua puluh miliar,” ujar Aning, Selasa (21/10/2025).

Menurut Aning, RSUD Surabaya Timur sejauh ini belum mampu memberikan kontribusi signifikan bagi masyarakat. Karena itu, DPRD mendorong agar Pemkot Surabaya lebih dulu fokus memperkuat fasilitas dan meningkatkan layanan di rumah sakit tersebut sebelum membuka proyek baru.

Selain itu, Aning juga menyoroti RSUD Bhakti Dharma Husada (BDH) yang dinilai masih membutuhkan penguatan, baik dari sisi sarana prasarana maupun kualitas pelayanan kesehatan.



Harapannya, setelah RS Surabaya Timur sudah stabil dan BDH juga berkembang, barulah pembangunan RS Surabaya Selatan dapat dianggarkan. Tapi bukan dari utang, melainkan dari APBD, hanya saja bukan di tahun 2026,” tegasnya.

Penundaan pembangunan RS Surabaya Selatan sebelumnya juga dikaitkan dengan kebijakan efisiensi Pemkot Surabaya, termasuk dampak dari pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah (TKD). Namun, Komisi C menilai langkah Wali Kota Eri Cahyadi tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah serta memastikan efektivitas belanja publik. (dims)



Komisi B DPRD Surabaya Apresiasi

Tambahan Modal Rp 10 Miliar untuk Dukung Pelaku UMKM



Hj. Enny Minarsih

Anggota Komisi B, Ketua BAPEMPERDA &
Bendahara Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SURABAYA (RadarJatim.id) Komisi B DPRD Kota Surabaya memberikan apresiasi atas langkah dari Pemerintah Kota Surabaya yang memberikan modal tambahan senilai Rp 10 miliar. Tambahan modal ini diberikan kepada PT BPR Surya Artha Utama (SAU) Persero untuk memperluas permodalan bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

Upaya Pemerintah Kota Surabaya ini menjadi bukti nyata bahwa ada upaya untuk memperkuat sektor ekonomi kerakyatan. Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Hj. Enny Minarsih mengatakan suntikan modal tersebut merupakan langkah tepat dalam memperkuat fungsi BUMD milik Pemkot Surabaya sebagai lembaga keuangan yang berperan langsung membantu masyarakat.

“Saya menyoroti adanya tambahan dana Rp10 miliar untuk BPR SAU. Ini langkah positif karena akan digunakan untuk memperkuat permodalan UMKM di Surabaya,” kata Enny Minarsih, Sabtu (25/10/2025).

Politisi Partai Keadilan Kota Surabaya ini menambahkan bahwa BPR SAU Perseroda memiliki dua program unggulan. Yaitu berfokus pada kemudahan akses pembiayaan usaha mikro, melalui PUSPITA (Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh) dan SIKUMIS (Pinjaman Kredit Usaha Mikro Surabaya).

“BPR SAU harus menjadi solusi bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program-program yang bersentuhan langsung dengan pelaku UMKM perlu mendapatkan dukungan dan perhatian serius,” terangnya.



Seperti diketahui hingga 2024, BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada 2.414 nasabah. Salah satu program andalannya, PUSPITA, menawarkan bunga rendah sekitar 3 persen per tahun dan menargetkan pelaku usaha mikro serta ultramikro di Surabaya. Pihaknya berharap, dengan tambahan modal ini dapat membuat BPR SAU semakin dikenal dan dipercaya masyarakat sebagai mitra keuangan yang ramah dan mudah diakses. “Kemudahan akses permodalan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Surabaya. Semoga di 2026 nanti, BPR SAU bisa lebih dekat dengan masyarakat,” pungkasnya.



Penyusunan APBD Kota Surabaya Tahun 2026,

Johari Mustawan Sarankan Disbudporapar Hitung Ulang Jumlah Penerima Beasiswa Pemuda Tangguh



H. Johari Mustawan, S.T.P., M.A.R.S.

Komisi D DPRD Kota Surabaya - Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

SuaraParlemen.co, Surabaya — Komisi D DPRD Kota Surabaya menggelar rapat koordinasi penyusunan APBD 2026 bersama sejumlah dinas terkait, Kamis (16/10). Dalam rapat tersebut, anggota Komisi D dari Fraksi PKS, Johari Mustawan, menyoroti program Beasiswa Pemuda Tangguh yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disbudporapar) Kota Surabaya.

Johari atau yang akrab disapa Bang Jo menyarankan agar Disbudporapar melakukan verifikasi ulang jumlah penerima beasiswa Pemuda Tangguh untuk tahun 2026. Program ini merupakan salah satu upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam mewujudkan visi “Satu Keluarga Satu Sarjana.”

“Awalnya, beasiswa Pemuda Tangguh direncanakan untuk 24.000 penerima, dari sebelumnya 5.500. Namun setelah diverifikasi, ternyata jumlah riilnya sekitar 15.500 orang,” jelas Bang Jo.

“**Dari 15.500 penerima itu, perlu ada sosialisasi dan koordinasi ulang antara Disbudporapar sebagai pelaksana dengan Bappedalitbang,” tambahnya.**



Bang Jo menilai masih terdapat kurangnya komunikasi antarinstansi mengenai data penerima beasiswa dan rencana pelaksanaan program di tahun anggaran 2026.

“Ini perlu diklarifikasi. Apakah targetnya tetap 24.000 mahasiswa atau hanya 15.500? Termasuk rencana kerja sama dengan kampus swasta juga harus diperjelas,” tegasnya.

Oleh karena itu, Bang Jo merekomendasikan agar Disbudporapar menunda pembahasan beasiswa sampai dilakukan koordinasi ulang dengan Bappedalitbang Kota Surabaya.

Dalam APBD 2026, alokasi anggaran untuk beasiswa Pemuda Tangguh diperkirakan mencapai Rp125 miliar untuk 24.000 mahasiswa. Pemerintah kota berencana menanggung biaya UKT sebesar Rp2.500.000 per mahasiswa. Namun, masih terdapat ketidaksesuaian dengan data sebelumnya yang menunjukkan UKT berkisar antara Rp4.000.000 hingga Rp5.000.000.

“Perlu kejelasan, apakah selisih antara Rp2,5 juta dengan Rp4 juta atau Rp5 juta itu akan tetap ditanggung Pemkot, atau dibebankan kepada mahasiswa penerima beasiswa. Sampai saat ini belum ada kejelasan,” ujar politisi PKS tersebut.

Menutup pembahasan, Bang Jo menegaskan bahwa Komisi D DPRD Surabaya akan meminta klarifikasi langsung kepada Pemerintah Kota terkait pelaksanaan Beasiswa Pemuda Tangguh tahun 2026.

“Kami berharap tidak ada perbedaan antara apa yang dijanjikan kepada masyarakat dengan realisasi di lapangan,” pungkasnya.



ABPD 2026,

Komisi C Dorong Pencapaian Serapan Anggaran OPD-OPD



H. Faris Abidin, S.Pi.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya
Anggota Fraksi PKS DPRD Kota Surabaya

Surabaya, newrespublika-Penyusunan APBD Kota Surabaya Tahun 2026 masih terus digodok di komisi-komisi DPRD Surabaya.

Anggota Komisi C DPRD Kota Surabaya dari PKS, Faris Abidin, S.Pi mengatakan, terkait pembahasan APBD 2006 yang paling krusial adalah dari anggaran masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah atau Dinas) perlu dijelaskan lagi, dan diperinci lagi mengenai program-program yang dicanangkan

Karena selama ini, terang Faris, ketika kita rapat dari program-program OPD untuk tahun 2026 masih jauh dari kata ideal, karena ada sebagian atau anggaran saja ada OPD yang dananya mencapai puluhan miliar rupiah, tapi programnya hanya tidak lebih dari satu program.

“Masih jauh dari analisis dan masih jauh dari target, jauh dari kata ideal dari program yang telah dibuat,” ujar Faris Abidin di Surabaya, Kamis (23/10/2025).

Ia menerangkan, Komisi C mendorong OPD harus melakukan kajian ulang lagi ya mengenai apa yang harus bisa dikerjakan di tahun 2026. Karena, terang politisi muda PKS Kota Surabaya, dari anggaran yang ada itu kan harapannya program-program yang terealisasi nantinya bisa sesuai dengan harapan masyarakat.

Ditanya soal program Pemkot Surabaya di 2026 fokus pada infrastruktur, Faris menjelaskan, terkait dengan infrastruktur, menurut pantauan dari kami ada anggaran-anggaran yang memang bisa dialokasikan untuk program atau kegiatan yang lainnya di masing-masing OPD.

Mungkin saja, kata Faris, ada yang tidak sesuai dengan realisasi kan kita berkaca dari tahun 2025 ketika dianggarkan sekian, kok serapannya tidak sesuai target.

Otomatis, sambung Faris, anggaran tahun sebelumnya yang tidak terserap bisa digeser dari anggaran program lain yang masih dalam kegiatan OPD yang sama, karena concernnya masih di bidang pembangunan



Misal seperti Rutilahu atau Rumah Tidak Layak Huni didandani Pemkot, pembangunan PJU atau Penerangan Jalan Umum,” ungkap Faris.



Dirinya kembali mengatakan, kalau kita melihat dari APBD tahun sebelumnya, setiap tahun harusnya ada peningkatan ya. Karena kan segiring berjalan dengan waktu karena kebutuhan dari masyarakat, pembangunan yang harus dikerjakan itu juga akan semakin meningkat daripada sebelumnya.

“Untuk detail angkanya berapa triliun APBD Kota Surabaya di 2026 masih kita bahas dalam penyusunan Raperda APBD 2026,” pungkasnya.(trs)

Majalah Digital *Semanggi*



FRAKSI PKS DPRD KOTA SURABAYA

update selalu di media sosial kami

   **pkspdprdsurabaya**

 **pkstvdprdsurabaya**

 **fraksi.pks-surabaya.or.id**